

DAMPAK KASUS PEMBAJAKAN KAPAL DI PERAIRAN SULU TERHADAP EKSPOR BATU BARA INDONESIA-FILIPINA TAHUN 2016

Author: Rizkia Puteri

Advisor: Dr. H. Tri Joko Waluyo, M. Si

Bibliography: Journals 23, Books 25, Thesis 5 and 23 Websites

Email: Rizkiaputeri20@gmail.com

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional- Konsentrasi Ekonomi Politik Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Indonesia is one of the largest coal exporting countries in the world and is the main source of coal importers to the Philippines as the main source of electricity generation in the Philippines. However, there are frequent hijacking of coal-laden ships in the waters of Sulu. Due to the piracy access of the Abu Sayyaf terrorism group, the national interests of the two countries were disturbed, in particular the series of kidnappings carried out by the group. Indonesia stopped sending coal exports to the Philippines at its peak in April 2016 after the kidnapping of 10 Indonesian citizens by the Abu Sayyaf Group so that the Indonesian government decided to temporarily send coal to the Philippines for a memorandum so that the economic and political impact of the relationship between the two countries can be seen. The purpose of this study was to determine the impact of cases of ship hijacking in upstream waters on coal exports between Indonesia and the Philippines in 2016.

This research uses qualitative methods, with the level of the nation state analysis. The author uses the export theory in the perspective of neoliberalism. To analyze this case, the authors processed data from various sources of books, journals, website, official Indonesian government reports, and various relevant scientific articles to discuss the problems in this study.

Based on the results of research data analysis, it is concluded that the hijacking of coal ships from Indonesia to the Philippines in Sulu waters in 2016 had an impact on bilateral relations between Indonesia and the Philippines in the economic and political fields. The relationship between the two countries was disrupted due to the piracy case so that Indonesia postponed the shipment of coal to the Philippines until an indefinite time, therefore the Indonesian government carried out a series of cooperation in the fields of bilateral, political and maritime security to prevent and combat ship hijacking by the Group. Abu Sayyaf.

Keywords: *Indonesia, Filipina, Export, Coal, Impact, Taxation Case, Abu Sayyaf, Crime*

PENDAHULUAN

Penelitian ini membahas mengenai “Dampak Kasus Pembajakan Kapal di Perairan Sulu Terhadap Ekspor Batu bara Indonesia-Filipina Tahun 2016” kemudian ditinjau dari kajian Ekonomi Politik Internasional yang merupakan konsentrasi penulis. Asia Tenggara memiliki jalur laut yang penting bagi lalu lintas pelayaran kapal-kapal dari seluruh dunia. Banyak kapal-kapal dagang dan pengangkut komoditas dari berbagai negara di dunia melewati laut Asia Tenggara.¹ Salah satu jalur yang sering di gunakan oleh kapal-kapal pelayaran khususnya perdagangan yaitu Selat Malaka. Selat Malaka merupakan jalur perdagangan paling vital dikawasan ini. Jalur ini menghubungkan kapal-kapal dari Samudera Hindia ke Pasifik, sekitar 65.000 kapal melewati jalur ini setiap tahun.²

Laut Sulu-Sulawesi merupakan alternatif jalur pelayaran kapal, terutama bagi kapal besar yang menuju berapa negara seperti Filipina.³ Laut Sulu-Sulawesi memiliki luas 210.000 km² yang

dikelilingi oleh Kepulauan Sulu seperti Palawan, Sabah, Mindanao, Kalimantan Timur, dan Sulawesi.⁴ Setidaknya setengah dari aktivitas pelayaran komersil melewati jalur ini, jumlah nilai perdagangan yang melewati jalur ini setiap tahunnya mencapai US\$ 800.000.000.⁵

Indonesia dan Filipina merupakan negara yang saling berdekatan dan dihubungkan oleh laut khususnya Laut Sulu, Filipina juga merupakan *partner* yang memberikan keuntungan bagi Indonesia dalam bidang perdagangan. Tercatat bahwa pada neraca perdagangan Indonesia dengan impor Filipina terhadap Indonesia pada periode Januari sampai dengan Desember 2015 mencapai 2,9 miliar dolar. Sementara Ekspor Filipina ke Indonesia hanya mencapai 62 juta dolar. Produk utama yang diimpor Filipina dari Indonesia diantaranya adalah otomotif, batu bara, kopi, dan produk-produk lainnya.⁶

Tingginya aktivitas pelayaran di laut Sulu-Sulawesi, selain menguntungkan disatu sisi juga memiliki resiko ancaman keamanan. Jalur perdagangan ini rawan dengan aksi kejahatan transnasional seperti

¹ "Policing Shoutheast Asia's Tri Border Area", di akses melalui <https://www.stratfor.com/article/policing-southeast-asias-tri-border-area>, di akses pada 15 Febuari 2020

² H.M Ibrahim dan Nezery Khalid. "Growing Shipping Traffic in the strait of Malacca: Some reflections on the Environtmental impact" (Kuala Lumpur: Maritim Institute of Malaysia, 2007). Hal.15.

³ Ho, Joshua. "The Security of Sea Lanes in Southeast Asia". Asia Survei, Vol. 4 Issue 46. (2006): Hal. 560.

⁴ Ian Storey. "Securing Southeast Asia's Sea Lanes: A Work in Progress". Asia Policy No.6 (Juli 2008): Hal.104.

⁵ Reginald Ramos, "Philippines: Shifting Tide in The Sulu-Celebes Sea". Perth USAsia Centre, Vol.4 (April 2017): 2

⁶ Filipina Sumbang Surplus Ekonomi Indonesia Terbesar. Tempo, 2 Juni 2016, <https://bisnis.tempo.co/read/776155/filipina-sumbang-surplus-ekspor-indonesiaterbesar>, diakses pada 5 desember 2019.

kejahatan terorganisir, perompakan peredaran narkoba, penyelundupan dan perdagangan manusia, keamanan lingkungan, dan terorisme. Kejahatan maritim ini menjadi ancaman keamanan kawasan regional dan global serta dapat menimbulkan dampak terhadap perdagangan internasional.⁷

kepentingan nasional kedua negara terganggu dengan keberadaan kelompok terorisme seperti Abu Sayyaf khususnya serangkaian penculikan yang dilakukan kelompok tersebut. Bahkan Indonesia sempat menghentikan pengiriman ekspor batu bara ke Filipina pada April 2016 setelah terjadinya penculikan WNI oleh Kelompok Abu Sayyaf⁸. Hal ini menyebabkan hubungan antar kedua negara terganggu dan dari segi perdagangan tentunya ada dampak kerugian bagi Indonesia maupun Filipina dalam segi perekonomian. Indonesia sebagai salah satu negara eksportir batu bara terbesar di dunia khususnya lagi pemasok utama batu bara Filipina, sehingga Indonesia menjadi sumber utama ekspor batu bara oleh Filipina.

⁷ Lihat Stratfor. (2016, June 3). Policing Southeast Asia's Tri-Border Area. Retrieved from <https://worldview.stratfor.com:https://worldview.stratfor.com/article/policing-southeast-asias-triborder-> diakses 5 Juni 2016.

⁸ Indonesia Demands Security for Ships in Philippines. Coal Exports Affected⁹. GMA Network, 24 Juni 2016, <http://www.gmanetwork.com/news/news/nation/571177/indonesiademands-security-for-ships-in-philippines-coal-exports-affected/story>, di akses pada tanggal 10 Oktober 2019.

Pada tahun 2016, terjadi beberapa kali kasus penculikan oleh Kelompok Abu Sayyaf yang korbannya sebagian besar adalah orang Indonesia. Sejak bulan maret 2016 terjadi banyak peristiwa pembajakan dengan permintaan uang tebusan. Masalah laut Sulu semakin pelik karena insiden pembajakan selalu terjadi di luar wilayah kerja TNI maupun Bakamla.⁹ Salah satu insiden yang merugikan Indonesia dan Filipina adalah pembajakan kapal milik PT. *United Tractors* dan penyanderaan terhadap 10 Anak Buah Kapal (ABK) Warga negara Indonesia.

Setelah terjadinya pembajakan ekspor batu bara Indonesia tujuan Filipina, hubungan kedua negara menjadi renggang, dan kegiatan ekspor pun menjadi terganggu selain itu terjadi juga pemberhentian ekspor batu bara Indonesia ke Filipina akibat rawannya situasi keamanan. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menegaskan bahwa Indonesia akan terus melakukan moratorium atau penundaan hingga mendapat jaminan keselamatan dari pemerintah Filipina.

Dari latar belakang yang telah dijelaskan bahwa kasus pembajakan kapal batu bara di Perairan Sulu yang dilakukan oleh kelompok pembajak kapal Abu Sayyaf sehingga pemerintah menghentikan sementara

⁹ Isa, Iswan Shafiq Mat. 2017. Laut Sulu Bukan 'Somalia Asia'?. <http://www.utusan.com.my/berita/luar-negara/laut-sulu-bukan-8216-somalia-asia-8217-1.464936>, diakses pada 13 Oktober, 2019.

ekspor batu bara ke Filipina Sehingga kegiatan perekonomian antar kawasan terganggu, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Dampak Kasus Pembajakan Kapal di Perairan Sulu Terhadap Ekspor Batu bara Indonesia-Filipina Tahun 2016”.

KERANGKA TEORI

Kerangka dasar diperlukan oleh peneliti untuk membantu dalam menetapkan tujuan dan membantu peneliti dalam memikirkan sebuah konsep yang tepat dalam penelitian tersebut dan dalam pembuatan hipotesa. Dengan kata lain teori merupakan landasan pemikiran dimana diperlukan sebuah metode untuk mengorganisir gejala atau sebab-sebab yang muncul yang akan diteliti dan memungkinkan akan menjadi sebuah jawaban jawaban dari sebuah ilmu.¹⁰

a. Perspektif Neoliberalisme

Pada dasarnya neo-liberalisme adalah sebuah reaksi terhadap membesarnya peran negara yang menyebabkan kehancuran sistem pasar. Jalan keluar yang diusulkan oleh ideologi neo-liberalisme adalah melucuti peran negara dan mengembalikan semua transaksi ekonomi ke dalam hukum pasar. Sehingga ketika Indonesia terjatuh pada krisis, neo-liberalisme

memberikan beberapa penjelasan tentang sebab-musabab nya.¹¹ Perspektif neo liberalisme juga dapat memberikan masukan dan saran untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi khususnya perdagangan dan pasar ekspor internasional.

Neoliberalisme menolak campur tangan negara dalam urusan ekonomi, karena mereka yang mengikuti paham ini menganggap campur tangan negara pada akhirnya akan mendistorsi atau memutarbalikkan fakta pasar dan membuatnya tidak efisien dan tidak sesuai kenyataan. Karenanya, liberalisasi dan privatisasi menjadi ciri penting dalam kebijakan neoliberalisme pada tingkat domestik.¹²

Neoliberalisme bertujuan mengembalikan kepercayaan pada kekuasaan pasar, dengan pembenaran mengacu pada kebebasan. Seperti pada contoh kasus upah pekerja, dalam pemahaman neoliberalisme pemerintah tidak berhak ikut campur dalam penentuan gaji pekerja atau dalam masalah-masalah tenaga kerja sepenuhnya ini urusan antara si pengusaha pemilik modal dan si pekerja. Pendorong utama kembalinya kekuatan kekuasaan pasar adalah privatisasi aktivitas-aktivitas ekonomi, terlebih pada usaha-usaha industri

¹⁰ Nazir, Moh. *Metode Penelitian Cetakan VI*. (Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 32.

¹¹ Eko Prasetyo. “*Kapitalisme dan Neoliberalisme*”. *Ekonomi Politik Journal Al-Manaar*, (Edisi I/2014) : Hal. 4.

¹² Apriidar, *Ekonomi Internasional . Sejarah, Teori, Konsep dan Permasalahan dalam Aplikasinya* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009). Hal. 23.

yang dimiliki atau dikelola pemerintah.¹³

b. Teori Ekspor

Ekspor adalah berbagai macam barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri lalu di jual di luar negeri. Ditinjau dari sudut pengeluaran, ekspor merupakan salah satu faktor terpenting dari *Gross Nasional Product* (GNP), sehingga dengan berubahnya nilai ekspor maka pendapatan masyarakat secara langsung juga akan mengalami perubahan. Di lain pihak, tingginya ekspor suatu negara akan menyebabkan perekonomian tersebut akan sangat sensitif terhadap keguncangan-keguncangan atau fluktuasi yang terjadi di pasaran internasional maupun di perekonomian dunia.¹⁴ Maka dari itu jika negara terlalu menggantungkan kebutuhan dari produk import atau kegiatan ekspor maka tentu suatu saat apabila terjadi pemberhentian kegiatan import dari negara lain maka akan menjadi suatu hambatan dari satu sektor atau sektor lainnya secara berantai. Kegiatan ekspor adalah sistem perdagangan dengan cara mengeluarkan barang-barang dari dalam negeri keluar negeri dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Ekspor merupakan total barang dan

jasa yang dijual oleh sebuah Negara ke negara lain, termasuk diantara barang-barang, asuransi, dan jasa-jasa pada suatu tahun tertentu.¹⁵

Ekspor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan. Banyak ahli ekonomi menganggap bahwa perdagangan internasional sebagai suatu keseimbangan kemampuan produksi internal dengan permintaan di dalam negeri. Menurut Todaro ekspor adalah kegiatan perdagangan internasional yang memberikan rangsangan guna menumbuhkan permintaan dalam negeri yang menyebabkan tumbuhnya industri-industri pabrik besar, bersama dengan struktur politik yang stabil dan lembaga sosial yang fleksibel. Dengan kata lain, ekspor mencerminkan aktifitas perdagangan internasional, sehingga suatu negara yang sedang berkembang kemungkinan untuk mencapai kemajuan perekonomian setara dengan negara-negara yang lebih maju.

c. Konsep Interdependensi

Interdependensi memiliki asumsi bahwa modernisasi akan sangat meningkatkan tingkat interdependensi antar negara. Pada interdependensi aktor transasional menjadi semakin penting, kekuatan militer merupakan instrumen yang

¹³ Apridar. *Ekonomi Internasional . Sejarah, Teori, Konsep dan Permasalahan dalam Aplikasinya* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009). Hal 21.

¹⁴ Irham Yogi, *Ekspor Di Indonesia*. Cetakan Pertama. Pustaka Binaman. (Pressindo. Jakarta, 2003). Hal. 3.

¹⁵Utomo Yuni Priadi. “*Ekspor Mendorong Pertumbuhan Atau Pertumbuhan Mendorong Ekspor*”. Jurnal Manajemen, Vol.1, No.1, Uii. Yogyakarta. (2000) : 1.

tidak absolut dan kesejahteraan merupakan tujuan yang dominan dari negara. Interdependensi kompleks akan menciptakan dunia hubungan internasional yang jauh lebih kooperatif saling ketergantungan (interdependensi) dapat terjadi dalam berbagai isu, seperti ekonomi, politik dan sosial.

Dalam interdependensi, terdapat setidaknya beberapa sektor ekonomi dan politik dalam hubungan interdependensi antar negara, yaitu sektor perdagangan, investasi, finansial dan politik. Sektor Perdagangan merupakan sektor penting dalam memahami ketergantungan ekonomi. Hubungan ekonomi melalui perdagangan dapat berubah dan perubahan tersebut dapat mempengaruhi interdependensi.

Dalam interdependensi, keberhasilan suatu negara dalam berkerjasama berpijak pada dua hal, yakni *power*, kemampuan tawar-menawar dan rezim internasional. *Power* dan kemampuan tawar-menawar terutama berkaitan dengan kondisi interdependensi yang asimetris. Hal ini dikarenakan meski dalam teorinya hubungan interdependensi mengarahkan pada suatu hubungan yang timbal balik, namun dalam kenyataannya hubungan yang simetris tersebut jarang terjadi. Karena itu *power* aktor dalam hubungan interdependensi akan beragam sesuai dengan isunya. Kemudian, rezim internasional akan bertumpu pada saling ketergantungan asimetris yang menyediakan setiap

pihak untuk saling mempengaruhi melalui kebijakan ekonomi-politiknya dalam mencapai kesepakatan antar mereka.¹⁶

d. Tingkat Analisis Negara Bangsa

Tingkat analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah negara-bangsa. Menurut Patrick Morgan¹⁷, tingkatan analisa dibagi dalam lima golongan, yakni: individu, perilaku kelompok, negara bangsa, dan perilaku negara-bangsa, serta sistem internasional atau global, penelaahan penelitian ini difokuskan pada dampak Kasus pembajakan kapal di perairan Sulu terhadap ekspor batu bara Indonesia-Filipina oleh suatu negara-bangsa sebagai satu kesatuan yang utuh, serta tingkat asumsinya yakni kedua negara pembuat keputusan, Indonesia dan Filipina. Dengan demikian, analisa harus ditekankan pada perilaku negara-bangsa karena hubungan internasional pada dasarnya didominasi oleh perilaku negara bangsa.

e. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu pernyataan yang pada waktu diungkapkan belum diketahui kebenarannya. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Berdasarkan latar belakang dan penjelasan diatas, maka

¹⁶ Agung Nugroho, *Interdependensi Sebagai Suatu Konsep* (Jakarta PT : Gramedia). Hal. 3.

¹⁷ Lihat Mohtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi*. (Jakarta: LP3ES, 1994) Hal. 55

penulis menarik sebuah hipotesis. “kasus pembajakan kapal di Perairan Sulu terhadap ekspor batu bara Indonesia-Filipina tahun 2016 berdampak negatif terhadap hubungan bilateral Indonesia-Filipina di bidang ekonomi dan politik”.

PEMBAHASAN

a. Kerjasama Indonesia Dan Filipina Dalam Bidang Keamanan, Ekonomi Dan Politik

Hubungan bilateral Indonesia dan Filipina terjalin dalam berbagai macam bidang, antara lain bidang pendidikan, keamanan, ekonomi, dan lainnya. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Filipina dimulai dari tahun 1949. Kedua negara sudah mendirikan kantor perwakilan kedutaan besar pada ibukotanya masing-masing, Indonesia memiliki kantor perwakilan kedutaan besar di Manila serta konsulat di Davao City, sementara itu Filipina memiliki kantor perwakilan kedutaan besar di Jakarta serta konsulat di Manado dan Surabaya.¹⁸

Dari data diatas diketahui beberapa aspek kerjasama indonesia-Filipina dalam bidang keamanan perbatasan, ekonomi perdagangan, penanggulangan terorisme dan kejahatan lintas Negara dan perwakilan di luar negeri yang bertugas dalam membina hubungan

non politik dengan negara filipina, yang disebut dengan perjanjian pemberitahuan wajib konsuler (*mandatory consular notification agreement*). Perjanjian yang penting untuk kedua negara, seandainya ada warga dari salah satu negara yang mengalami permasalahan bisa saling memberi tahu dengan cepat kepada pemerintahnya. Sehingga perlindungan kepada warga negara itu bisa langsung diberikan. maka dapat diketahui bahwa terdapat hubungan yang baik antara pemerintah Indonesia dengan Filipina khususnya kerjasama Bilateral.

Kerjasama dalam bidang keamanan yang dilakukan antara Indonesia dan juga Filipina terjadi dalam 21 Juni 2005 yang telah disetujui di Manila. Kedua negara dirasa perlu bekerjasama lantaran selain mempunyai faktor geografis yang saling terhubung kedua negara serta banyaknya keterkaitan antar kelompok radikal yang ada di Indonesia dan juga Filipina. Faktor inilah yang menjadi pertimbangan oleh kedua negara untuk membuat kerjasama supaya dapat menjaga keamanan negara, kawasan regional baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Banyaknya insiden-insiden yang melibatkan kedua negara merupakan faktor penyebab kedua negara mempererat kembali hubungan kerjasama yang pernah terjalin. Kerjasama yang mulanya hanya dalam bentuk deklarasi bersama semakin besar dengan menggunakan

¹⁸

https://id.wikipedia.org/wiki/Hubungan_Filipina_dengan_Indonesia, diakses 21 juni 2019

penandatanganan nota kesepahaman antara pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Filipina pada kejahatan transasional sehingga pada saat membuat kesepakatan kedua negara yang membuat mekanisme-mekanisme hukum yang sejalan berdasarkan hukum dan aturan yang berlaku dalam masing-masing Negara.

b. Kerjasama Indonesia dan Filipina dalam Bidang Politik

Kepentingan politik juga termasuk kepentingan suatu negara dalam menjalin kerjasama antar negara lainnya, termasuk bangsa Indonesia untuk pemeliharaan keutuhan kedaulatan negara. Dari data yang di dapatkan banyak bentuk Kerjasama politik yang sudah dibuat oleh kedua negara supaya dapat memelihara stabilitas dan kedaulatan antar negara. Hubungan yang baik antara Indonesia dan Filipina terlihat saat kunjungan Presiden Benigno S. Aquino III ke Jakarta tanggal 8-9 Maret 2011 yang menghasilkan 4 kesepakatan Kerjasama di berbagai bidang.

Kesepakatan Kerjasama yang dijalin Indonesia Filipina 2011 yakni: *MoU on Basic Education, MoU on Sports Cooperation, MoU on Cooperation in Preventing and Combating Transnational Crimes and Capacity Building, Joint Declaration concerning Maritime Boundary Delimitation*. Kemudian dilanjutkan pada bulan Mei 2014 kembali terjalin kesepakatan pada perbatasan Zona

Ekonomi Eksklusif di Perairan Mindanao dan Sulawesi Utara. Kunjungan presiden Filipina selanjutnya mengunjungi Jakarta dalam rangka mendatangi Rangkaian KTT ke 18 ASEAN Lepas 7-8 Mei 2011 serta KTT ke-19 ASEAN di Bali pada tanggal 17-19 November 2011.

c. Kerjasama Indonesia dan Filipina dalam Bidang Perdagangan

Batu bara adalah salah satu bahan bakar fosil yang sangat penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Seperti minyak bumi, banyak sekali kegiatan sehari-hari kita yang memanfaatkan batu bara sebagai sumber energi. Oleh karena itu, batu bara merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat diperlukan dalam industrialisasi. Negara-negara pengeksport batu bara terbesar di dunia mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari perdagangan batu bara. Namun, batu bara merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, maka dari itu banyak kegunaan batu bara sebagai bahan baku industri dan listrik. Indonesia melakukan ekspor batu bara ke beberapa negara sebagai kegiatan ekspor dan perdagangan internasional

Semenjak Filipina melakukan kerjasama mulai banyak meminta impor batu bara dari Indonesia, karena pembangkit listrik di Filipina menggunakan komoditas batu bara tersebut, Indonesia dan Filipina memiliki hubungan yang baik di

berbagai bidang baik ekonomi, politik, keamanan, maupun sosial budaya yang saling menguntungkan. Filipina adalah penyumbang surplus terbesar ketiga setelah Belanda khususnya dalam perdagangan yang diketahui pada tahun 2015 mencapai 519,4 juta dolar AS. Potensi pasar produk Indonesia di Filipina cukup tinggi, terutama untuk produk-produk makanan dan minuman yang belum digarap optimal oleh pengusaha Indonesia," ujarnya. Irawan optimistis bila perekonomian dunia pulih kembali, ekspor Indonesia ke Filipina maupun sebaliknya bisa meningkat lebih besar dari tahun lalu dan tahun ini. Penelitian ini menganalisis dampak kasus pembajakan kapal di perairan Sulu terhadap ekspor batu bara Indonesia-Filipina. Selain melihat bagaimana hubungan antara variabel-variabel seperti dampak ekonomi dan dampak politik dari kasus tersebut terhadap hubungan ekonomi politik Indonesia-Filipina tahun 2016.

d. Kasus Pembajakan Kapal Indonesia Terhadap Ekspor Batu Bara Di Perairan Sulu

Penculikan ABK asal Indonesia pada Maret dan April 2016 lalu merupakan pertama kalinya penduduk Indonesia menjadi target kelompok Abu Sayyaf dan pertama kalinya kapal asing diserang. Salah satu alasan kapal-kapal berbendera Indonesia menjadi target pembajakan kapal oleh kelompok Abu Sayyaf adalah sejak penjualan batu bara

dengan rute Kalimantan-Filipina dan sebaliknya melalui laut Sulu kian meningkat sedangkan, perpindahan kapal-kapal tongkang tersebut cenderung lambat sehingga kelompok Abu Sayyaf menyadari bahwa kapal-kapal tersebut dapat dijadikan target yang mudah¹⁹.

Kapal pertama yang direbut oleh kelompok Abu Sayyaf adalah kapal *Brahma 12* dan kapal *Anand 12* yang mengangkut 7.500 ton batu bara untuk Batangas, Luzon. Kapal berangkat dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan menuju Filipina pada 15 Maret 2016. Di perairan Tawi-Tawi, kapal tersebut direbut dan 10 ABK diculik. Kemudian pada 15 April 2016, kelompok Abu Sayyaf mendatangi sebuah kapal dengan menggunakan kapal speedboat, kapal *Henry* yang akan kembali ke Tarakan, Kalimantan Utara dari Cebu, Filipina.

Dalam upaya pembebasan sandera di tahun 2016, Menlu Retno Marsudi mengatakan bahwa banyaknya pihak yang terlibat baik dari jajaran pemerintahan maupun NGO dan aktor non-negara lainnya. Yayasan Sukma yang berkoordinasi dengan pemerintah melalui Edi Mulya, Minister Counselor Kedubes RI di Filipina. Tim negosiator dari Yayasan Sukma tidak melakukan negosiasi dengan kelompok Abu Sayyaf sendiri namun juga dibantu oleh 2 LSM yang merupakan lembaga pemberdayaan masyarakat dan anti

¹⁹ IPAC. (2019). *Protecting The Sulu-Sulawesi Seas From Abu Sayyaf Attacks*. Hal. 4-5

kekerasan yang ada di Filipina Selatan. Dengan adanya kerja sama yang terjalin antara Yayasan Sukma dengan 2 LSM sangat membantu Yayasan Sukma untuk menjalin kontak dengan kelompok MNLF, tokoh penting yang terlibat dalam upaya tersebut. Kelompok MNLF tersebut memiliki kontak dengan anggota kelompok Abu Sayyaf.²⁰

Pembebasan WNI yang sudah berhasil merupakan hasil dari kerja sama antar intelijen dari pemerintah Indonesia dan negosiasi yang dilakukan oleh NGO dan tokoh agama dan aktor non-negara lainnya yang terlibat. Operasi intelijen yang dilakukan bukanlah dalam bentuk operasi militer melainkan dengan cara mengirimkan penasihat atau ahli dan negosiator yang dibagi menjadi tiga tim yang berada di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri.²¹

e. Dampak Ekonomi Politik Indonesia Dan Filipina Sesudah Kasus Pembajakan

Insiden pembajakan yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf tentunya dapat mengakibatkan dampak ekonomi bagi negara-negara yang menggunakan laut Sulu-Sulawesi sebagai jalur transportasinya, dampak ekonomi yang tampak tentunya mempengaruhi

kegiatan ekspor impor masing-masing negara serta pendapatan dan pemanfaatan dan kebutuhan negara tersebut. Perompakan yang terjadi di laut Filipina Selatan memiliki ancaman serius bagi Indonesia dan Filipina, dalam segi ekonomi, politik dan keamanan maritim. Keberadaan perompakan kelompok Abu Sayyaf jika dikaitkan dengan aspek ekonomi bagi Indonesia tentu dapat mengganggu dan merusak stabilitas ekonomi maritim Indonesia. Keberadaan perompakan sangat mengancam kepentingan ekonomi maritim Indonesia dikarenakan wilayah maritim Indonesia memiliki beragam potensi yang luar biasa. Laut Sulawesi memiliki beragam potensi untuk membangun dan mengembangkan industri maritim.

Perompakan dan pembajakan yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf di Laut Sulu mengganggu stabilitas ekonomi maritim Indonesia dan berkurangnya pelayaran di Laut Sulu karena pemerintah mengambil kebijakan moratorium yang mengakibatkan banyak kapal-kapal tidak berlayar menuju Filipina. Akibatnya ekspor batu bara Indonesia ke Filipina pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 13.581 juta ton.²²

Aktivitas perompakan Kelompok Abu Sayyaf yang meningkat di tahun 2016 mengakibatkan wilayah laut Filipina

²⁰ Tempo. (2016). *Berebut Panggung Pembebasan Sandera*. Jakarta: Tempo. hlm. 30

²¹ Wangkey, Humprey. (2016). *Keberhasilan Diplomasi Total*. Majalah Info Singkat Hubungan Internasional, VII. hlm. 6

²² Indonesia Eximbank Institute, *Proyeksi Ekspor Berdasarkan Industri : Komoditas Unggul* Jakarta, Indonesia Eximbank, 2019.

Selatan menjadi tidak aman sehingga pada tanggal 21 September 2016 *The Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia* (ReCAAP ISC) mengeluarkan pernyataan agar seluruh kapal menghindari wilayah ini dan memilih jalur lebih aman walaupun lebih jauh. Mengingat, terjadi peningkatan jumlah ekspor dan impor batu bara yang melewati daerah ini sehingga apabila ada ancaman pembajak kapal sudah dapat dipastikan bahwa dampaknya mengarah pada semakin meningkatnya biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan pelayaran seperti adanya penambahan biaya di bagian bahan bakar karena kapal harus memutar menggunakan wilayah laut Cina selatan atau melalui Laut Sulawesi bagian timur dan timur laut dan melewati Laut Filipina tetapi jika kapal ingin tetap melewati Laut Sulu tentunya untuk melalui dengan cepat dan menghindari ancaman dari Kelompok Abu Sayyaf maka kapal harus menggunakan kecepatan tinggi untuk melewati daerah ini. Pembiayaan lainnya seperti biaya menyewa senjata serta perlengkapan keamanan lainnya, biaya asuransi untuk ABK dan biaya lain-lainnya. Penambahan pengeluaran perusahaan atas biaya yang dibutuhkan tentunya menimbulkan beban *cost* terhadap perusahaan mengakibatkan kerugian untuk perusahaan serta negara dan

dampak berat lainnya adalah melumpuhkan aliran niaga global.²³

f. Dampak Politik Sesudah Kasus Pembajakan Indonesia-Filipina

Kebijakan moratorium yang diambil Indonesia mengakibatkan kapal-kapal Indonesia tujuan Filipina tidak dapat berlayar, karena tidak berlayarnya kapal-kapal Indonesia ke Filipina mengakibatkan lesunya pelayaran industri di Indonesia dan mengganggu iklim bisnis pelayaran khususnya batu bara yang menggunakan jalur laut. Di tahun 2014 volume ekspor Indonesia ke Filipina mencapai 15 ton dan di tahun 2015 meningkat menjadi 15,8 juta ton. Meskipun volume ekspor batu bara Indonesia ke Filipina terus meningkat, di tahun 2016 ekspor batu bara Indonesia ke Filipina terhenti karena terjadi pembajakan kapal asal Indonesia yang dilakukan oleh kelompok militan Abu Sayyaf di Laut Sulu. Kebijakan moratorium ini diambil oleh pemerintah Indonesia sampai ada jaminan keamanan dari pemerintah Filipina.

Pada tahun 2016, pemerintah Indonesia menghentikan pengiriman batu bara dari sejumlah daerah Kalimantan ke Filipina. Sikap tegas itu dilakukan sampai ada jaminan dari pemerintah Filipina terhadap keamanan kapal-kapal yang mengangkut batu bara dari Indonesia ke Filipina. Kebijakan ini dilatar

²³ ReCAAPISC annual report 2018,op.cit. hlm. 1

belakangi oleh maraknya aksi pembajakan kapal dan juga penculikan kru serta penumpang kapal yang melintas di wilayah perairan Laut Sulu oleh Kelompok Abu Sayyaf yang menjadi perbatasan antara Indonesia dan juga Filipina.²⁴

Berkembangnya isu dalam hubungan internasional dan mengubah situasi keamanan tradisional menjadi nontradisional. ketidakstabilan keamanan kawasan di Asia Tenggara menjadi sorotan baik skala regional maupun internasional, isu keamanan laut terasa paling dominan karena geografis Asia Tenggara yang terdiri atas Negara-negara dengan banyak pulau. Melalui Forum dialog dari institusi terkait dengan masalah Kelautan/ Maritim. Pembentukan AMF tertuang dalam APSC (*ASEAN Political-Security Community*) Blueprint (2009-2015) yaitu dalam butir A.2.5 Mempromosikan Kerja Sama Maritim ASEAN yaitu: dengan membentuk ASEAN Maritime Forum (AMF); Menerapkan pendekatan komprehensif yang menekankan pada Keselamatan navigasi dan keamanan regional yang menjadi kepentingan bersama bagi komunitas ASEAN; Mengumpulkan isu-isu maritim dan mengidentifikasi kerja sama maritim diantara Negara-negara Anggota ASEAN; Mempromosikan kerja sama dalam SAR maritim melalui kegiatan-kegiatan, meliputi pertukaran

informasi, kerja sama teknologi dan pertukaran antar pejabat terkait.²⁵

Setelah terjadinya insiden pembajakan dan penyanderaan kapal oleh Kelompok Abu Sayyaf dan juga membuat wilayah perairan Indonesia, Malaysia dan Filipina menjadi perairan yang tidak aman maka tentu pemerintahan antar negara perlu membuat kesepakatan kerjasama mengenai keamanan wilayah perairan dan batas wilayah serta kerjasama dalam menumpas teroris pembajak kapal yang sangat meresahkan bagi Indonesia, Filipina dan pelaku usaha bidang transportasi laut serta komoditi non migas seperti batu bara. Maka dari itu pentingnya kerjasama bilateral politik maupun keamanan dari masing-masing negara dalam satu kegiatan yaitu mencegah dan memberantas kegiatan perompak di wilayah perairan perairan antar negara.

KESIMPULAN

Pembajakan yang terjadi pada 2016 menimbulkan dampak-dampak dalam ekonomi dan politik Indonesia Filipina. Dampak ekonomi, diantaranya perompakan dan pembajakan yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf di laut sulu mengganggu stabilitas ekonomi maritim Indonesia dan berkurangnya pelayaran di laut sulu karena

²⁴ Valery Fathur, *Kerjasama Indonesia Dan Filipina Dalam Menghadapi Kasus Pembajakan Kapal di Wilayah Perbatasan Pada Tahun 2016-2018*, Uii. hlm. 35

²⁵ Trialen, L. Gaol. *Peran Asean Maritime Forum (AMF) Dalam Menjaga Keamanan Maritim (Studi Kasus Perompakan Di Perairan Selat Malaka)*. UNRI. jom Fisip Volume 4 No. 1 Februari 2017. hlm. 4

pemerintah mengambil kebijakan moratorium yang mengakibatkan banyak kapal-kapal tidak berlayar menuju Filipina. Akibatnya ekspor batu bara Indonesia ke Filipina pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 13.581 juta ton.

Dampak ekonomi lainnya adalah semakin meningkatnya biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan pelayaran. Seperti pembiayaan bahan bakar karena kapal harus menggunakan kecepatan tinggi untuk melewati daerah ini. Pembiayaan lainnya seperti biaya menyewa pengawalan senjata serta perlengkapan keamanan lainnya, biaya asuransi untuk ABK dan biaya lain lain. Pengeluaran perusahaan seperti biaya biaya di atas menimbulkan kerugian untuk perusahaan serta negara dan dampak berat lainnya adalah melumpuhkan aliran niaga global.

Selain dampak ekonomi kasus pembajakan pada tahun 2016 juga berdampak pada politik Indonesia dan Filipina, di antara nya adalah di tahun 2016 ekspor batu bara Indonesia ke Filipina terhenti karena terjadi pembajakan kapal asal Indonesia yang dilakukan oleh kelompok militan Abu Sayyaf di Laut Sulu. Kebijakan moratorium di ambil oleh pemerintah Indonesia sampai bentuk ketegasan dari pemerintah indonesia sampai ada jaminan keamanan dari pemerintah Filipina.

Jadi, penulis menyimpulkan bahwa kasus pembajakan yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf

terhadap kapal batu bara Indonesia secara ekonomi cukup menimbulkan pengaruh terlalu besar, hal tersebut dapat dilihat dari ekspor batu bara Indonesia ke Filipina pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 13.581 juta ton terdapat penurunan sekitar 4116 ton atau 23% dari pengiriman tahun sebelumnya yaitu 17697. secara ekonomi maritim kejadian tersebut sangat berpengaruh di karenakan potensi ekonomi maritim Indonesia di laut Sulawesi sangat besar, kemudian pengaruh dari kebijakan moratorium yang di ambil oleh Indonesia dalam penghentian ekspor batu bara ini lebih berdampak besar terhadap Filipina karena 70% kebutuhan batu bara di Filipina diekspor dari Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

Adhe Nuansa Wibisono, 2016. *Kelompok Abu Sayyaf dan Radikalisme di Filipina Selatan: Analisis Organisasi Terorisme Asia Tenggara*, Fisip Fisip Universitas Al-Azhar dan Freedom Foundation Jakarta, No. 1, Vol. 3.

Ayuningtyas, Fiessca Novsella. 2016. "Efektifitas Kerjasama Indonesia-Filipina dalam penanganan kasus IUU Fishing Oleh Filipina di Perairan Indonesia Periode 2008-2014". jurnal of internasional relations, volume 2.

- Dwi Siswaningsih, 2015. *“Peluang dan Tantangan Indonesia Pasar Bebas ASEAN Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)”*, Warta Ekspor, Edisi Januari, Jakarta: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia,
- Carolina, Lauria Tika dan Aminata, Jaka 2018 *“Analisis Daya Saing Dan Faktor Yang Mempengaruhi Ekspor Batu bara”*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
- Catherine Zara Raymond. 2005. *“Piracy in Southeas Asia New Trends, Issues and Responses”*, RSIS Working Paper No.089 Oktober.
- Devantier, L, Wikinson, C., & Alcala, A. C. 2004. *“The Sulu-Sulawesi Sea: Environmental and Socioeconomic Status, Future Prognosis and Ameliorative Policy Options, AMBIO A Journal of the*
- Buku :**
- Ariadno, Melda Kamil 2017. *hukum internasional hukum yang hidup*”, jakarta: penerbit Diadit Media.
- Agung. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT Remaja Rusdakarya Offset.
- Amir M.S. 1979. *Pedoman dan Istilah penting Perdagangan Internasional*, Jakarta, Bharrata.
- Apridar, *Ekonomi Internasional*. 2019. *Sejarah, Teori, Konsep dan Permasalahan dalam Aplikasinya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bourke. 2003. *International Politics on The World Stage*. New York: McGraw-Hill/Dushkin.
- Dugi, Vinsensio, 2016. *Teori Hubungan Internasional Perspektif-Perspektif Klasik*. Surabaya: PT Revka Petra Media.
- Hadi, Sutrisno. 1980. *Metodologi Research I*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Psikologi Universitas Gadjah Mada.
- Herdi Sahrasad & Al Chaidar, 2017. *Fundamentalisme, Terorisme Dan Radikalisme Perspektif Atas Agama, Masyarakat dan Negara*, jakarta. University of Indonesia.
- Irham, Yogi. 2003. *Ekspor Di Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta : Pustaka Binaman Pressindo.
- James, Mauna. 1986. *Contending Theoris of International Relations : A Comprehensive Survei*. New York : Harper And Row.
- K J Holsti. 1992. *International Politics, A Framework for Analysis*. New Jersey: Prentice-Hall.

- Lazarus. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Laut Internasional*, Semarang: Pusat Studi hukum laut.
- Marthen Luther Djari, 2013. *Terorisme dan TNI*, Jakarta: CMB Press.
- Mas'oed, Mohtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia.
- Nugroho, Agung. 2004. *Interdependensi Sebagai Suatu Konsep* Jakarta PT: Gramedia
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian Cetakan VI*. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia
- Perwita, Anak Agung Banyu dan Bantarto Bandoro (ed), 2013. *Pengantar Kajian Strategis*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Prasetiyo, Eddy. 2005. *Keamanan Internasional dan Politik Luar Negeri Indonesia*, Jakarta: CSI.
- Roestandi, 1988. Ahmad SH dan Zul Afdi Ardian SH. *Tata Negara Jilid 2*, Bandung: Armico.
- Rinaldy Eddie, Ikhlas Denny, Utama Ardha. 2018. *Perdagangan Internasional. Konsep dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Raco, J.R. 2010. *Metode Peneliti Kualitatif*, Jakarta: Grasindo
- Sjamsumar Dam dan Riswandi, 1995. *Kerjasama ASEAN, Latar Belakang, Perkembangan, dan Masa Depan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sungkar, Yasmin. 2008. *Isu-Isu Keananan Strategis dalam Kawasan ASEAN*. Jakarta: P2P-LIPI.
- Tambunan 2004. *Globalisasi dan Perdagangan Internasional*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Wendt, Alexander. 1999. *Social Theory of International Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Skripsi :**
- Ario Triwibowo Yudhoatmojo, Tesis: “Penerapan Yuridiksi Universal untuk Menanggulangi dan Mengadili Pembajakan di Laut Berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Kasus Pembajakan di Teluk Aden” , (Salemba: Universitas Indonesia: 2010).
- Nuansa Wibisono, Adhe, Skripsi: “kelompok Abu Sayyaf dan Radikalisme di Filipina Selatan”, (Jakarta :2014). Hal. 2.

Widiastuti, Anik M.Pd dan wulandari, taat M.Pd, Skripsi:” *Kerjasama Internasional*” (Fakultas Ilmu Sosial: Universitas negeri Yogyakarta, 2012), Hal. 28-30.

Tobing, Fredy B. L, Tesis. “*Peran Negara dalam Menangani Isu Bajak Laut yang Bersifat Transnasional di Asia Tenggara*”. Jurnal Hukum Internasional, Depok: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004. Hal. 156 yang dikutip dari Ario Triwibowo Yudhoatmojo, *Penerapan Yuridiksi Universal untuk Menanggulangi dan Mengadili Pembajakan di Laut Berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Kasus Pembajakan di Teluk Aden*, Salemba: Universitas Indonesia, (2010), Hal. 9.

Banlaoi, Rommel C, Skripsi “*Al Harakatul Al Islamiyah: Essays on the Abu Sayyaf Group*”, Hal. 15.

Website :

Cahyo Sasmito, Dyana Sari. “Pengantar Ekonomi Politik”. (2019): SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3331869> atau <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3331869> (diakses 8 september, 2020).

Charles Comer “The Parting of the Sulawesi Sea: How U.S. strategy in the region is slowly transforming the multinational environment in Southeast Asia’s Terrorist Transit Triangle ” <http://fmso.leavenworth.army.mil/documents/SulawesiSea.pdf> , diakses 20 Oktober 2020.

Dewi Divianta, “Pertemuan 3 ‘Negara’ di Bali Membahas Keamanan Laut Sulu”, 2 Agustus 2016, <http://global.liputan6.com/read/2567141/pertemuan-3-negara-di-bali-membahas-keamananlaut-sulu>, diakses pada 18 september 2020.